



**LAPORAN KINERJA (LAKIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMATAN TENGAH**



Jl. Jenderal Achmad Yani
Komplek Perkantoran
Pemkab Katingan
Kabupaten Katingan
Kasongan 74413

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan telah selesai disusun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Disadari sepenuhnya bahwa LAKIP ini belum dapat tersusun secara sempurna sesuai apa yang diharapkan, namun demikian kiranya dapat memberikan bahan dan gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat sejauh mana tingkat kinerja yang dicapai oleh KPU Kabupaten Katingan dalam menjalankan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab.

Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang sangat kami harapkan agar dapat selalu meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalisme kinerja KPU Kabupaten Katingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan agar proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Katingan dapat berjalan dengan lancar dan aman sesuai kehendak kita bersama.

Kasongan, 25 Januari 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Ketua,



WAHYUNI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*.

Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Katingan yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan serta bersifat tetap dan hierarkis dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU (Pusat).

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh Rakyat.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. Tujuan

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Katingan.
2. Sebagai bahan analisis dan evaluasi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Pelaporan Kinerja Tahun 2023 dilakukan pada KPU Kabupaten Katingan dan Sekretariat KPU Kabupaten Katingan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kabupaten Katingan mempunyai tugas:

1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan;
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Katingan ke luar dan ke dalam;
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Katingan;
4. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Katingan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Katingan bertanggung jawab kepada rapat pleno. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.

Setiap anggota KPU Kabupaten Katingan memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik :
 - a. Administrsasi Perkantoran;
 - b. Kearsipan;
 - c. Protokol dan Persidangan;
 - d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - e. Kerumahtanggaan dan Kantor;
 - f. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - g. Logistik;
 - h. Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Divisi Teknis;
 - a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - d. Pergantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.
3. Divisi Perencanaan dan Data :
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih;
 - c. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - d. Pengelolaan Jaringan IT;
 - e. Scan Hasil Pemilu;
 - f. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.
4. Divisi Hukum :
 - a. Pembuatan rancangan keputusan;
 - b. Verifikasi Partai Politik;
 - c. Verifikasi DPS;
 - d. Pelaporan Dana Kampanye;
 - e. Telaah Hukum;
 - f. Advokasi Hukum;
 - g. Sengketa Hukum;
 - h. Dokumen Hukum;
 - i. Pengawasan/Pengendalian Internal
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :
 - a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;

- b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhoc;
- c. Diklat dan Pengembangan SDM;
- d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
- e. Penegakan Disiplin Organisasi;
- f. Kampanye;
- g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
- h. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- i. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
PERIODE 2023-2028

1. Ketua : Wahyuni
2. Anggota : Habibi Mubarak
3. Anggota : Didun Niaton
4. Anggota : Krifiatno
5. Anggota : Ovi Monita

KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
PERIODE 2023-2028

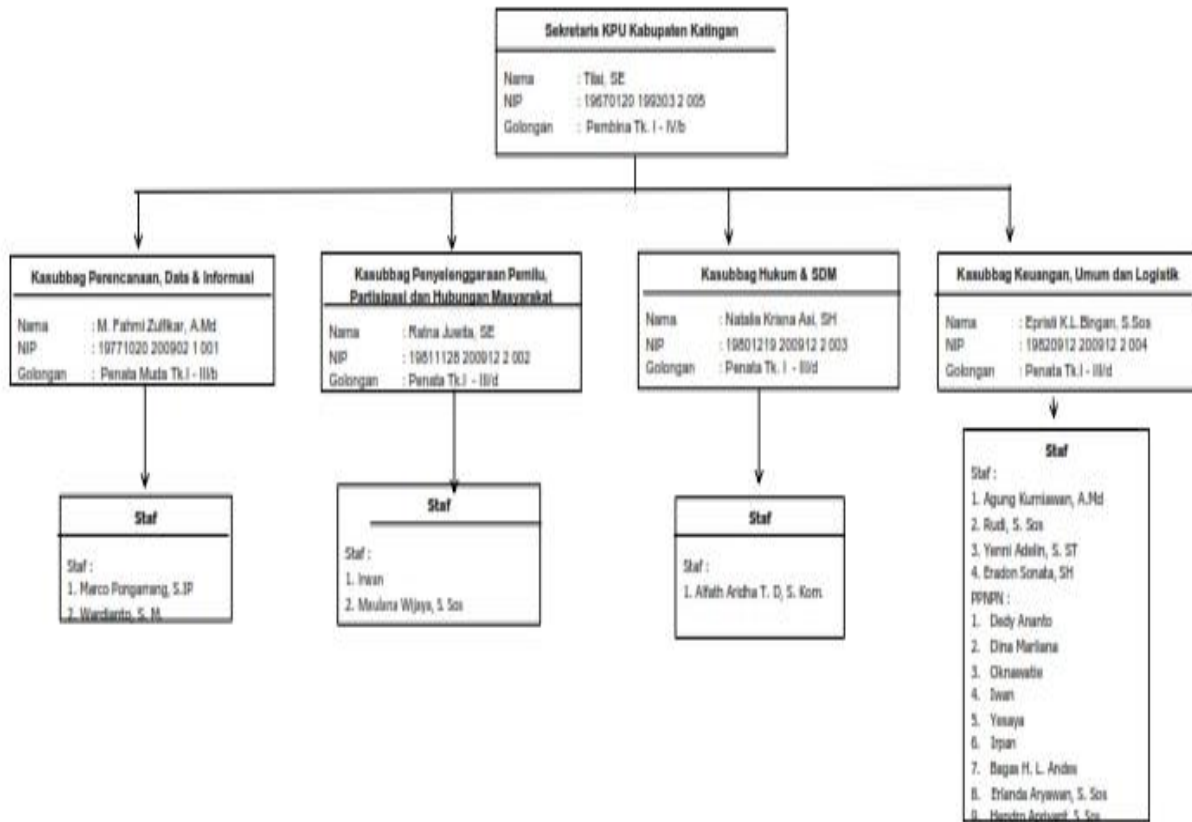
NO.	NAMA DIVISI	JABATAN PADA DIVISI
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	1.Ketua : Wahyuni 2.Wakil Ketua : Ovi Monita
2.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	1.Ketua : Habibi Mubarak 2.Wakil Ketua : Didun Niaton
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1.Ketua : Didun Niaton 2.Wakil Ketua : Krisfiatno
4.	Divisi Hukum dan Pengawasan	1.Ketua : Krisfiatno 2.Wakil Ketua : Wahyuni
5.	Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu	1.Ketua : Ovi Monita 2.Wakil Ketua : Habibi Mubarak

**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
PERIODE 2023-2028**

NO.	NAMA KORWIL	JABATAN PADA KORWIL
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Katingan Hilir, Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing	1. Ketua : Wahyuni 2. Wakil Ketua : Krisfiatno
2.	Tasik Payawan dan Kamipang	1. Ketua : Habibi Mubarak 2. Wakil Ketua : Ovi Monita
3.	Katingan Tengah, Sanaman Mantikei dan Petak Malai	1. Ketua : Didun Niaton 2. Wakil Ketua : Habibi Mubarak
4.	Marikit, Katingan Hulu dan Bukit Raya	1. Ketua : Krisfiatno 2. Wakil Ketua : Didun Niaton
5.	Katingan Kuala dan Mendawai	1. Ketua : Ovi Monita 2. Wakil Ketua : Wahyuni

**STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
KEADAAN : JANUARI TAHUN 2024**

lampiran II.b.2



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN



NIP 196701201993032005

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
KEADAAN : JANUARI TAHUN 2024**

lampiran
La

NO	NAMA	TEMPAT/TL LAIR	NP	PENDIKJAT		JABATAN		JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN		DIKLAT						Kategori
				SOLUSI	T.B.T	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	T.B.T			UMUM	T.B.T	Struktural	Tgl	Pengu sat	Tgl	Teknis	Tgl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah : 10 Orang																		
1	TLAI, SE	Kapuas, 20-01-1967	19670120 198303 2 005	Peminda Tk. I (Rb)	01/10/2023	Sekretaris	13/05/2017	Perempuan	Kristen	SI Ekonomi	1981/2002	DIKLATPM Tk. II	27-08-2018 s.d 27-12-2018	-	-	-	-	ORGANIS
2	EPRISTU K.L. BINGAN, S.Sos	P. Raya, 12-09-1962	19620912 200912 2 004	Peminda Tk. I- (Rb)	01/04/2020	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	11-03-2022	Perempuan	Kristen	SI Sosial	10-05-2004	PRAJABATAN	16 s.d 28-09-2019	-	-	-	-	ORGANIS
3	NATIA LINTA, SE	P. Raya, 28-11-1981	19811128 200912 2 002	Peminda Tk. I- (Rb)	01/04/2020	Kasubag Teknis dan Humas	11-03-2022	Perempuan	Islam	SI Ekonomi	09-12-2008	PRAJABATAN	24 s.d 9-10-2019	-	-	-	-	ORGANIS
4	NATALIA KRISNA AIS, SH	Sempit, 19-12-1983	19831219 200912 2 003	Peminda Tk. I (Rb)	01/04/2022	Kasubag Hukum dan SDM	11-03-2022	Perempuan	Kristen	SI Hukum	28-09-2004	PRAJABATAN	16 s.d 28-09-2019	-	-	-	-	ORGANIS
5	M.PAHMI ZULFIKAR, AME	P. Raya, 20-10-1977	19771020 200902 1 001	Peminda Muda (Rb)	01-04-2021	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	11-03-2022	Laki-laki	Islam	SI Akuntansi	10-05-2004	PRAJABATAN	2009	-	-	-	-	ORGANIS
6	AGUNG KURNIAWAN, AME	Jakarta, 28-April 1978	19780428 201012 1 003	Peminda Muda Tk. I (Rb)	01/04/2022	Pengurusan Rencana Kebutuhan Purnakarya dan Pensiunan	10-03-2018	Laki-laki	Islam	SI-H Management Informatika	20-11-2008	PRAJABATAN	22 s.d 12-03-2017	-	-	-	-	ORGANIS
NO	NAMA	TEMPAT/TL LAIR	NP	PENDIKJAT		JABATAN		JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN		DIKLAT						Kategori
				SOLUSI	T.B.T	STRUKTURAL	T.B.T			UMUM	T.B.T	Struktural	Tgl	Pengu sat	Tgl	Teknis	Tgl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	PUJDI, Sos	P. Raya, 20-12-1962	19621220 201701 1 002	Peminda Muda Tk. I (Rb)	01/04/2023	Pengurusan Laporan Keuangan	01-10-2019	Laki-laki	Islam	SI Sosial		PRAJABATAN	11-07-2008	Struktur dan Peng sat	20-10-2011 s.d 12-12-2011	1408 Hukum Perantara Kebijakan	01-11-08	ORGANIS
8	YENNI AZELIN, S. ST	Pondok, 21 Desember 1962	19621221 201903 2 012	Peminda Muda Tk. I (Rb)	01/04/2023	Analisa Pengelolaan Keuangan	01-04-2020	Perempuan	Kristen	SI Administrasi Niaga	21-10-2015	PRAJABATAN	10-09-2019 s.d 14-11-2019	-	-	-	-	ORGANIS
9	RIYAN	Karangas, 01 Juni 1983	19830601 201701 1 023	Pengantar Tk. I (Rb)	01/04/2019	Pengantar Informasi dan Komunikasi	10-03-2018	Laki-laki	Kristen	SMA	21-05-1999	PRAJABATAN	20-07-2008 s.d 10-05-2008	-	-	-	-	ORGANIS
10	WIKO PONGAPRANG, S. P	Pangkalan, 22-05-1963	19630522 201212 1 007	Peminda Muda (Rb)	01/12/2020	Analisa Data dan Informasi	04/01/2021	Laki-laki	Islam	SI Ilmu Politik	18-08-2018	PRAJABATAN	22-08-2022	-	-	-	-	ORGANIS
11	ERADON SONATA, SH	Tanah, 08 Juni 1965	19650608 201212 2 014	Peminda Muda (Rb)	01/12/2020	Analisa Organisasi	04/01/2021	Perempuan	Katolik	SI Ilmu Hukum	12-08-2017	PRAJABATAN	22-08-2022	-	-	-	-	ORGANIS
																		ORGANIS

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
KEADAAN : JANUARI TAHUN 2024

lampiran II.c

NO. URUT	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN		Status Pegawai	Tugas Pokok	Keterangan
					UMUM	T.M.T			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH = 12									
1	Dedy Ananto	Timpah, 07 Juli 1976	Laki-laki	Kristen	SLTA	26/07/2007	PPNPN	Pengemudi	APBN
2	Dina Marlana	Kasongan, 26 Juli 1986	Perempuan	Kristen	SLTA	18/08/2001	PPNPN	Pramubakti	APBN
3	Oktawatie	Tumbang Liting, 10 Oktober 1986	Perempuan	Kristen	SLTA	05/08/2014	PPNPN	Pramubakti	APBN
4	Iwan	Palangka Raya, 15 Juli 1990	Laki-laki	Islam	SLTA	01/08/2016	PPNPN	Tenaga Administrasi	APBN
5	Yesaya	Tewah, 12 Januari 1982	Laki-laki	Kristen	SLTA	09/06/1990	PPNPN	Jagal Saksana	APBN
6	Ipan	Petak Bahandang, 16 Juni 1991	Laki-laki	Islam	SLTA	29/07/2009	PPNPN	Jagal Saksana	APBN
7	Bagas Hendrika Lahir Andes	Tumbang Lahang, 01 Januari 1996	Laki-laki	Kristen	SLTA	03/07/2005	PPNPN	Jagal Saksana	APBN
8	Alfiah Aritcha T. D.	Kasongan, 24 Juni 1996	Laki-laki	Islam	S1	25/06/2021	PPNPN	Tenaga Administrasi	APBN
9	Erianda Anyawan	Sleman, 21-1-1996	Laki-laki	Islam	S1	02/11/2020	PPNPN	Tenaga Administrasi	APBN
10	Hendro Apriyanto	Tumbang Panggo, 30 Juni 1999	Laki-laki	Islam	S1	13/07/2020	PPNPN	Tenaga Administrasi	APBN
11	Maulana Wijaya	Kampung Melayu, 20 Juli 1997	Laki-laki	Islam	S1	06/06/2019	PPNPN	Tenaga Administrasi	APBN
12	Wardianto	Tewang Darayu, 6 Agustus 1999	Laki-laki	Kristen	S1	03/09/2021	PPNPN	Tenaga Administrasi	APBN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Sekretaris,

TILA, SE
 NIP. 19670120 199303 2 005



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUBANDY

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kasongan, 03 Januari 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Presentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan	90%
2.	Program Dukungan Manajemen	Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan), Efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna).	90%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 13.679.662.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.301.136.000

Kasongan, 03 Januari 2023



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

Nama Unit : KPU KABUPATEN KATINGAN

Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN	PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 (satu) Satker	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 13.679.662.000	
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 (satu) Layanan	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.039.479.000	
4.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Perkantoran	1 (satu) Layanan	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 254.597.000	
5.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	1 (satu) Layanan	Data dan informasi	Rp. 7.060.000	

Kasongan 17 Januari 2023
Ketua,

SUBANDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TILAI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUBANDY

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SELAKU PIHAK KEDUA
KETUA
KPU KABUPATEN KATINGAN



Kasongan, 03 Januari 2023
SELAKU PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU KABUPATEN KATINGAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 Satker
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Layanan
3.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Layanan
4.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 13.679.662.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.301.136.000

Kasongan, 03 Januari 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengiriman Logistik	Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	1 NSPK
2.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Data Kebutuhan dan Penganggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Layanan
3.	Berjalannya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan
4.	Tersedianya Layanan Administrasi Kepemiluan	Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Layanan
5.	Tersedianya Data dan Informasi Publik	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Layanan
6.	Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Layanan
7.	Tersedianya Data dan Informasi Publik	Publikasi Informasi	1 Layanan
8.	Berjalannya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Suervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan
9.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan
10.	Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal	Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan
11.	Terlaksananya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan
12.	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan
13.	Terlaksananya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan
14.	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Layanan
15.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan
16.	Terlaksananya Layanan Sarana Internal	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Unit
17.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	1 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 13.679.662.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.301.136.000

Kasongan, 3 Januari 2023-

**KETUA
KPU KABUPATEN KATINGAN,**

SUBANDY

**SEKRETARIS
KPU KABUPATEN KATINGAN,**

TILAI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

PERJANJINAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **EPRISTRI KL BINGAN**
Jabatan : Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat KPU
Kabupaten Katingan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TILAI**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasongan, 03 Januari 2023

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**



**PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

EPRISTRI KL BINGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

PERJANJINAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RATNA JUWITA**
Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Humas
Sekretariat KPU Kabupaten Katingan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TILAI**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasongan, 03 Januari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

TILAI

PIHAK PERTAMA
KASUBAG TEKNIS DAN HUBMAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

RATNA JUWITA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

PERJANJINAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NATALIA KRISNA ASI**
Jabatan : Kasubag Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Katingan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TILAI**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasongan, 03 Januari 2023

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**



**PIHAK PERTAMA
KASUBAG HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**


NATALIA KRISNA ASI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

PERJANJINAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M FAHMI ZULFIKAR**
Jabatan : Kasubag Program Data dan Informasi Sekretariat KPU
Kabupaten Katingan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TILAI**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasongan, 03 Januari 2023

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

**PIHAK PERTAMA
KASUBAG PROGRAM DAN DATA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

M FAHMI ZULFIKAR

E. Pengertian

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian Negara/ lembaga sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian Negara/ lembaga dalam bentuk upaya satuan kerja yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian Negara/ lembaga yang dilaksanakan oleh satuan kerja.

9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar utama hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
13. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

F. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas Pokok dan Fungsi
- E. Pengertian
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2015 – 2019
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Tahun 2023
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2019-2023

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Katingan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2023.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan focus prioritas:

- (1) Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Demokrasi;
- (2) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; dan
- (3) Peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Berpijak pada sasaran dan focus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui :
 - a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Partai Politik;
 - b. Perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah;
 - c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan
 - d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, dan fasilitasi pembahasan UU Penanganan Konflik;
 - b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa;
 - c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik;
 - d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa;
 - e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan politik; dan
 - f. Penguatan dan pengembangan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.
3. Fasilitasi penyusunan mekanisme kebijakan public dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui :
- a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi public; dan
 - c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.

B. Rencana Strategis 2019-2024

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap

Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2019-2024, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *“Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Untuk menjabarkan Visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) selama kurun waktu 2020-2024. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 Satker
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Layanan
3.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Layanan
4.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	1 Layanan
5.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengertian akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas suatu instansi pemerintah. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian organisasi.

Kinerja KPU Kabupaten Katingan Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Katingan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 melalui Penetapan Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Presentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan	95.74%
2	Program Dukungan Manajemen	Presentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan), Efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna).	85.84%

Rata-rata capaian kinerja KPU Kabupaten Katingan pada tahun 2023 sebesar 90 %. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target
4	72 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Katingan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Katingan pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
------------------	--

Sasaran ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan dan indicator kegiatan sasaran selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengiriman	Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	1 NSPK	1 NSPK
2.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Data Kebutuhan dan Penganggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Layanan	1 Layanan
3.	Berjalannya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan	0 Laporan

SASARAN 2	Program Dukungan Manajemen
------------------	-----------------------------------

Dari sasaran kedua ini, realisasi dari kegiatan dan indikator kinerja KPU Kabupaten Katingan dapat dijelaskan sebagai berikut

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersedianya Layanan	Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Layanan	1 Layanan
2.	Tersedianya Data dan Informasi	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Layanan	1 Layanan
3.	Tersedianya Pelayanan Publik	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan	1 Layanan	1 Layanan
4.	Tersedianya Data dan Informasi	Publikasi Informasi	1 Layanan	1 Layanan
5.	Berjalannya Layanan Monitoring dan Evaluasi	Suervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	1 Laporan
6.	Terlaksananya Layanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	0 Layanan

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
7.	Terlaksananya Layanan	Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan
8.	Terlaksananya Layanan Monitoring dan Evaluasi	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan
9.	Terlaksananya Layanan Data dan	Dokumenmtasi Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan	1 Layanan
10.	Terlaksananaya Layanan Monitoring dan Evaluasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan
11.	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Layanan	1 Layanan
12.	Terlaksananya Layanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
13.	Terlaksananya Layanan Sarana	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Laporan	1 Unit
14.	Terlaksananya Monitoring dan	Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran yang telah dikeluarkan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Katingan dalam rangka melaksanakan sasaran strategis dari Pagu Anggaran keseluruhan dengan beberapa kali revisi adalah sebesar Rp 24.479.201.000; (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Satu Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp 23.478.084.695; (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Delapan Puluh Empat Ribu Juta Enam Ratus Sembilah Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 95.91% dengan rincian realisasi sebagai berikut :

REKAP PELAPORAN RINCIAN OUTPUT

TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun : 2023
 K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UK, Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK RII	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
3355.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
1	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1		2,199,834,000	2,177,849,581	99.00%	99.00 %
3355.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal									
2	3355.EBD.995 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	1		44,382,000	20,165,737	45.44%	45.00 %
3360.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
3	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1		43,638,000	40,104,600	91.90%	92.00 %
6034.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
4	6034.EBA.903 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1		7,060,000	0	0.00%	1.00 %
6709.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
5	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Lembaga	1	1		886,576,000	843,452,081	95.14%	95.00 %
6	6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Lembaga	1	1		1,000	0	0.00%	1.00 %
7	6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Lembaga	1	1		1,343,000	0	0.00%	1.00 %
8	6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Lembaga	1	1		401,108,000	269,130,000	67.10%	67.00 %

NO	NOMENKLATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK RIII	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
9	6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	Lembaga	1	1		12,000,000	7,977,912	66.48%	66.00 %
6709.RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi									
10	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu	Unit	1	1		3,578,000	1,000,000	17.93%	17.00 %
6710.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
11	6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Lembaga	1	1		27,733,000	24,210,000	87.29%	87.00 %
6867.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
12	6867.QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Lembaga	1	1		226,340,000	70,084,000	30.96%	30.00 %
13	6867.QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	Lembaga	1	1		13,684,900,000	13,388,650,000	99.39%	99.00 %
14	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Lembaga	1	2		3,176,700,000	3,088,250,139	97.22%	97.00 %
6870.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
15	6870.QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	Lembaga	1	1		24,995,000	18,149,728	72.61%	72.00 %
16	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Lembaga	1	1		50,611,000	12,853,000	25.40%	26.00 %
17	6870.QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Lembaga	1	1		870,000	0	0.00%	1.00 %
6871.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
18	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Lembaga	1	1		508,283,000	368,031,316	72.01%	72.00 %
19	6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga	1	1		394,278,000	300,309,010	76.22%	76.00 %

NO	NOMENKLATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK RIII	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
20	0871.QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Lembaga	1	1		120,384,000	114,985,398	95.36%	93.00 %
0872.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
21	0872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Lembaga	1	1		40,909,000	30,379,211	74.26%	66.00 %
22	0872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Lembaga	1	1		3,960,000	0	0.00%	1.00 %
23	0872.QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Lembaga	1	1		870,000	0	0.00%	1.00 %
0887.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
24	0887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	Lembaga	1	1		122,958,000	118,002,125	95.97%	90.00 %
0888.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
25	0888.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Lembaga	1	1		13,892,000	0	0.00%	1.00 %
0889.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
26	0889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Lembaga	1	1		166,575,000	135,901,305	81.59%	83.00 %
0890.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum									
27	0890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Lembaga	1	1		313,205,000	250,367,152	79.94%	80.00 %

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658588 KPU KABUPATEN KATINGAN

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	24,479,201,000	0	19,328,464,324	4,149,620,371	23,478,084,695	95.91 %	1,001,116,305
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	22,184,287,000	0	17,153,540,043	4,080,424,734	21,233,964,777	95.74 %	944,322,223
CQ.0709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,306,608,000	0	647,079,832	474,480,141	1,121,559,993	85.84 %	185,048,007
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,301,030,000	0	646,079,832	474,480,141	1,120,559,993	86.13 %	180,470,007
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	880,570,000	0	438,900,940	344,545,141	843,452,081	95.14 %	43,123,919
111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	880,570,000	0	438,900,940	344,545,141	843,452,081	95.14 %	43,123,919
111.0A PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	103,855,000	0	49,728,296	40,650,000	90,378,296	87.02 %	13,476,704
111.0B Dukungan Keperluan Muntariti	52,000,000	0	48,559,100	0	48,559,100	93.38 %	3,440,900
111.0C Dukungan Keperluan Operasional Kantor	396,280,000	0	295,905,841	85,630,542	381,536,383	96.28 %	14,743,617
111.0C Rapat Koordinasi Bidang Keuangan dan BMN	72,000,000	0	47,136,000	24,684,000	71,820,000	99.75 %	180,000
111.0C Tambahan revisi 7	197,424,000	0	26,933,633	169,194,599	196,128,232	99.34 %	1,295,768
111.0C Tambahan Perencanaan	65,017,000	0	30,644,070	24,386,000	55,030,070	84.64 %	9,986,930
QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
111.0A FASILITASI SELAKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1,345,000	0	0	0	0	0.00 %	1,345,000
111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1,345,000	0	0	0	0	0.00 %	1,345,000
111.0A PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KEPEMILUAN	1,345,000	0	0	0	0	0.00 %	1,345,000
QGE.008 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	401,108,000	0	139,195,000	129,935,000	269,130,000	67.10 %	131,978,000
111 Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	401,108,000	0	139,195,000	129,935,000	269,130,000	67.10 %	131,978,000
111.0A SOSIALISASI / TATAP MUKA	82,810,000	0	81,190,000	0	81,190,000	98.04 %	1,620,000
111.0B PENYUSUNAN LAPORAN	624,000	0	0	0	0	0.00 %	624,000
111.0C DUKUNGAN PELAKSANAAN KIRAB SETAHUN MENJUJI HARI PEMILIHAN	50,000,000	0	49,900,000	0	49,900,000	99.80 %	100,000
111.0B Tambahan Anggaran Sosialisasi	109,500,000	0	8,105,000	78,835,000	86,940,000	79.40 %	22,560,000
111.0B Tambahan revisi 7	158,174,000	0	0	51,100,000	51,100,000	32.31 %	107,074,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658588 KPU KABUPATEN KATINGAN

Hal 2 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	12.000.000	0	7.977.912	0	7.977.912	66.48 %	4.022.088
112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	12.000.000	0	7.977.912	0	7.977.912	66.48 %	4.022.088
112.0A SOSIALISASI KEBIJAKAN / REGULASI KPU	10.800.000	0	6.777.912	0	6.777.912	62.76 %	4.022.088
112.0B PENGELOLAAN JDIH	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	100.00	0
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.578.000	0	1.000.000	0	1.000.000	17.93 %	4.578.000
RAN.001 Sarana IT Pemilu	5.578.000	0	1.000.000	0	1.000.000	17.93 %	4.578.000
110 Pengelolaan Sarana IT KPU	5.578.000	0	1.000.000	0	1.000.000	17.93 %	4.578.000
110.0A Pengelolaan IT Pemilu	5.578.000	0	1.000.000	0	1.000.000	17.93 %	4.578.000
CQ.6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	27.735.000	0	10.400.000	13.810.000	24.210.000	87.29 %	3.525.000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	27.735.000	0	10.400.000	13.810.000	24.210.000	87.29 %	3.525.000
QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	27.735.000	0	10.400.000	13.810.000	24.210.000	87.29 %	3.525.000
051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	27.735.000	0	10.400.000	13.810.000	24.210.000	87.29 %	3.525.000
051.0A VERIFIKASI FAKTUAL DAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	15.800.000	0	0	13.810.000	13.810.000	87.41 %	1.990.000
051.0B DUKUNGAN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA	1.500.000	0	0	0	0	0.00 %	1.500.000
051.0C PELAKSANAAN TAMBAHAN DUKUNGAN KEPEMILUAN	10.435.000	0	10.400.000	0	10.400.000	99.66 %	35.000
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	19.087.940.000	0	15.803.638.100	2.943.346.039	18.746.984.139	98.21 %	340.961.861
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	19.087.940.000	0	15.803.638.100	2.943.346.039	18.746.984.139	98.21 %	340.961.861
QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	220.346.000	0	47.559.000	22.525.000	70.084.000	30.96 %	156.262.000
051 Fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	220.346.000	0	47.559.000	22.525.000	70.084.000	30.96 %	156.262.000
051.0A Fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	83.234.000	0	47.559.000	22.525.000	70.084.000	84.20 %	13.150.000
051.TB Seleksi KPPS	143.112.000	0	0	0	0	0.00 %	143.112.000
QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	15.684.900.000	0	13.933.400.000	1.655.250.000	15.588.650.000	99.39 %	96.250.000
051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	15.684.900.000	0	13.933.400.000	1.655.250.000	15.588.650.000	99.39 %	96.250.000
051.0A Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	8.332.450.000	0	8.349.850.000	0	8.349.850.000	99.97 %	2.600.000
051.TB Tambahan SABA BUN Honor Adhoc	7.332.450.000	0	5.583.550.000	1.655.250.000	7.238.800.000	98.72 %	93.650.000
QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	3.176.700.000	0	1.822.679.100	1.265.571.039	3.088.250.139	97.22 %	88.449.861

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658588 KPU KABUPATEN KATINGAN

Hal 3 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	3,176,700,000	0	1,822,679,100	1,265,571,039	3,088,250,139	97.22 %	88,449,861
051.0A Dukungan Operasional Badan Adhoc	2,246,000,000	0	1,822,679,100	415,000,000	2,238,279,100	99.66 %	7,720,900
051.RT Tambahan Operasional PPK dan PPS	426,000,000	0	0	426,000,000	426,000,000	100.00	0
051.TB Bintek PPK dan PPS	504,700,000	0	0	423,971,039	423,971,039	84.00 %	80,728,961
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	76,476,000	0	18,149,728	12,855,000	31,004,728	40.54 %	45,471,272
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	76,476,000	0	18,149,728	12,855,000	31,004,728	40.54 %	45,471,272
QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	24,995,000	0	18,149,728	0	18,149,728	72.61 %	6,845,272
051 Persiapan Kampanye Pemilu	24,995,000	0	18,149,728	0	18,149,728	72.61 %	6,845,272
051.0A Persiapan Kampanye Pemilu	24,995,000	0	18,149,728	0	18,149,728	72.61 %	6,845,272
QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	50,611,000	0	0	12,855,000	12,855,000	25.40 %	37,756,000
051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	50,611,000	0	0	12,855,000	12,855,000	25.40 %	37,756,000
051.0A Pengelolaan Kampanye Pemilu	35,611,000	0	0	12,855,000	12,855,000	36.10 %	22,756,000
051.TB Tambahan Anggaran	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	870,000	0	0	0	0	0.00 %	870,000
051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	870,000	0	0	0	0	0.00 %	870,000
051.0A Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	870,000	0	0	0	0	0.00 %	870,000
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1,023,147,000	0	155,793,629	625,732,495	781,526,124	76.38 %	241,620,876
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,023,147,000	0	155,793,629	625,732,495	781,526,124	76.38 %	241,620,876
QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	508,285,000	0	117,862,144	248,169,372	366,031,516	72.01 %	142,253,484
051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	508,285,000	0	117,862,144	248,169,372	366,031,516	72.01 %	142,253,484
051.0A Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Alokasi Logistik Pemilu	99,132,000	0	25,008,080	32,717,000	57,725,080	58.23 %	41,406,920
051.TL Tambahan Logistik	409,153,000	0	92,854,064	215,452,372	308,306,436	75.35 %	100,846,564
QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	394,278,000	0	23,632,323	276,876,687	300,509,010	70.22 %	93,768,990
051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	394,278,000	0	23,632,323	276,876,687	300,509,010	70.22 %	93,768,990
051.0A Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	108,200,000	0	20,043,907	53,878,100	73,922,007	68.32 %	34,277,993
051.TL Tambahan Logistik	286,078,000	0	3,588,416	222,998,587	226,587,003	79.20 %	59,490,997
QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	120,584,000	0	14,299,162	100,680,436	114,983,598	95.36 %	5,598,402

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658588 KPU KABUPATEN KATINGAN

Hal 4 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	120.584,000	0	14,299,162	100,086,436	114,385,598	95.36 %	5,598,402
051.0A Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
051.TL Tambahan Kegiatan Lainnya	119,584,000	0	14,299,162	100,086,436	114,385,598	96.15 %	4,598,402
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	45,745,000	0	17,479,211	12,900,000	30,379,211	66.41 %	15,365,789
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	45,745,000	0	17,479,211	12,900,000	30,379,211	66.41 %	15,365,789
QGE.001 Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	40,909,000	0	17,479,211	12,900,000	30,379,211	74.26 %	10,529,789
051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	40,909,000	0	17,479,211	12,900,000	30,379,211	74.26 %	10,529,789
051.0A Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	40,909,000	0	17,479,211	12,900,000	30,379,211	74.26 %	10,529,789
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	3,966,000	0	0	0	0	0.00 %	3,966,000
051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	3,966,000	0	0	0	0	0.00 %	3,966,000
051.0A Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	3,966,000	0	0	0	0	0.00 %	3,966,000
QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	870,000	0	0	0	0	0.00 %	870,000
051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	870,000	0	0	0	0	0.00 %	870,000
051.0A Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	870,000	0	0	0	0	0.00 %	870,000
CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	122,958,000	0	118,002,125	0	118,002,125	95.97 %	4,955,875
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	122,958,000	0	118,002,125	0	118,002,125	95.97 %	4,955,875
QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	122,958,000	0	118,002,125	0	118,002,125	95.97 %	4,955,875
051 Pemutakhiran Data Pemilih	122,958,000	0	118,002,125	0	118,002,125	95.97 %	4,955,875
051.0A Bimtek, Rapat Koordinasi, Rapat Pleno Terbuka	47,364,000	0	42,888,125	0	42,888,125	90.55 %	4,475,875
051.TA Dukungan Pelaksanaan Penetapan DPT	61,752,000	0	61,274,000	0	61,274,000	99.23 %	478,000
051.TB Dukungan Kegiatan Rakor DPSHP	13,842,000	0	13,840,000	0	13,840,000	99.99 %	2,000
CQ.6888 Penetapan Peserta Pemilu	13,892,000	0	0	0	0	0.00 %	13,892,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	13,892,000	0	0	0	0	0.00 %	13,892,000
QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13,892,000	0	0	0	0	0.00 %	13,892,000
051 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13,892,000	0	0	0	0	0.00 %	13,892,000
051.TJ Tambahan revisi 7	13,892,000	0	0	0	0	0.00 %	13,892,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIP atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIP/POK selesai menjadi DIP.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658588 KPU KABUPATEN KATINGAN

Hal 5 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
CQ.6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	166.575.000	0	132.630.246	3.301.059	135.931.305	81.60 %	30.643.695
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	166.575.000	0	132.630.246	3.301.059	135.931.305	81.60 %	30.643.695
QGE.001 Fasilitas Keseluruhan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	166.575.000	0	132.630.246	3.301.059	135.931.305	81.60 %	30.643.695
051 Fasilitas Keseluruhan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	166.575.000	0	132.630.246	3.301.059	135.931.305	81.60 %	30.643.695
051.0A PENETAPAN DAN SOSIALISASI DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI	24.325.000	0	8.874.900	3.301.059	12.175.959	50.06 %	12.149.041
051.0B FASILITASI PERMASALAHAN PASCA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI	24.425.000	0	10.183.000	0	10.183.000	41.69 %	14.242.000
051.0C Tambahan Dukungan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024	117.825.000	0	113.572.346	0	113.572.346	96.39 %	4.252.654
CQ.6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	313.205.000	0	250.367.152	0	250.367.152	79.94 %	62.837.848
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	313.205.000	0	250.367.152	0	250.367.152	79.94 %	62.837.848
QGE.001 Fasilitas Keseluruhan Kegiatan Pencalonan	313.205.000	0	250.367.152	0	250.367.152	79.94 %	62.837.848
051 Fasilitas Keseluruhan Kegiatan Pencalonan	313.205.000	0	250.367.152	0	250.367.152	79.94 %	62.837.848
051.0A PENCALONAN ANGGOTA DPD	113.481.000	0	100.974.513	0	100.974.513	88.98 %	12.506.487
051.0B PERSIAPAN PENCALONAN DPRD KABUPATEN/KOTA	20.949.000	0	19.523.051	0	19.523.051	93.20 %	1.425.949
051.0C PENGGAJIAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	178.775.000	0	129.868.988	0	129.868.988	72.64 %	48.906.012
WAProgram Dukungan Manajemen	2.294.914.000	0	2.174.924.281	63.195.637	2.238.119.918	97.53 %	56.794.082
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.244.216.000	0	2.134.819.681	63.195.637	2.198.015.318	97.94 %	46.200.682
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.199.834.000	0	2.123.437.681	54.411.900	2.177.849.581	99.00 %	21.984.419
EBA.994 Layanan Perkantoran	2.199.834.000	0	2.123.437.681	54.411.900	2.177.849.581	99.00 %	21.984.419
001 Gaji dan Tunjangan	2.199.834.000	0	2.123.437.681	54.411.900	2.177.849.581	99.00 %	21.984.419
001.0A Gaji dan Tunjangan	1.438.834.000	0	1.371.777.481	54.411.900	1.426.189.381	99.12 %	12.644.619
001.0B Uang Kehormatan	761.000.000	0	751.660.200	0	751.660.200	98.77 %	9.339.800
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	44.382.000	0	11.382.000	8.783.737	20.165.737	45.44 %	24.216.263
EBD.995 Layanan Manajemen Keuangan	44.382.000	0	11.382.000	8.783.737	20.165.737	45.44 %	24.216.263
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	44.382.000	0	11.382.000	8.783.737	20.165.737	45.44 %	24.216.263
005.0A Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	21.691.000	0	1.572.000	8.783.737	10.355.737	47.74 %	11.335.263
005.0B Penyusunan Laporan Keuangan Tahapan Pemilihan dan	22.691.000	0	9.810.000	0	9.810.000	43.23 %	12.881.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658588 KPU KABUPATEN KATINGAN

Hal 6 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
005.0B Tahapan Pemilu Tahun 2024	22,691,000	0			9,810,000	43.23 %	12,881,000
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	43,638,000	0	40,104,600	0	40,104,600	91.90 %	3,533,400
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	43,638,000	0	40,104,600	0	40,104,600	91.90 %	3,533,400
EBA.994 Layanan Perkantoran	43,638,000	0	40,104,600	0	40,104,600	91.90 %	3,533,400
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	43,638,000	0	40,104,600	0	40,104,600	91.90 %	3,533,400
002.0A Layanan Perkantoran	43,638,000	0	40,104,600	0	40,104,600	91.90 %	3,533,400
WA.6634 Data dan Informasi	7,060,000	0	0	0	0	0.00 %	7,060,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,060,000	0	0	0	0	0.00 %	7,060,000
EBA.903 Layanan Data dan Informasi	7,060,000	0	0	0	0	0.00 %	7,060,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	7,060,000	0	0	0	0	0.00 %	7,060,000
005.0A Layanan Data dan Informasi	7,060,000	0	0	0	0	0.00 %	7,060,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan KPU Kabupaten Katingan Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Katingan dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Katingan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2019-2023, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Katingan 2019-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Katingan tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dan capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Katingan pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Katingan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula dan penyandang disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
4. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, *stakeholder*, badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu, serta peserta Pemilu;
5. Memperluas cakupan sampling review laporan keuangan satker dan melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator Sistem

- Akuntantsi Instansi (SAI) untuk meningkatkan kemampuan SDM pada masing-masing satker dalam penyusunan laporan; dan
6. Pelaksanaan lelang oleh satker agar dilakukan lebih awal, sehingga jika terjadi gagal lelang dapat segera diantisipasi untuk lelang ulang dan upaya tidak lanjutnya.

Dengan adanya kendala yang dihadapi di tahun 2023 ini, diharapkan sebagai pembelajaran untuk menentukan rencana strategi pada tahun 2024 yang akan datang agar lebih memantapkan penyusunan rencana strategi di tahun-tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Katingan Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan/kinerja di tahun berikutnya.

Kasongan, 25 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Ketua,


WAHYUNI